

BAB IV

AL JAZEERA DALAM KRISIS HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB

SAUDI-QATAR TAHUN 2017

Al Jazeera bukan hanya sebagai media berita yang memiliki ruang lingkup regional bahkan internasional, tetapi juga media berita yang punya pengaruh terhadap berbagai aspek. Al Jazeera membawakan politik ke dalam ruang televisi publik dan memengaruhi opini mereka. Bahkan Al Jazeera juga telah mampu berpengaruh terhadap dinamika politik regional Timur Tengah, seperti yang telah dibahas dalam bab II. Dalam fenomena sosial dan politik di wilayah Timur Tengah paling tersorot di dunia, yaitu *Arab Spring*, Al Jazeera hadir di dalamnya dan memiliki intensi tersendiri. Bahkan bisa dikatakan Al Jazeera, yang merupakan media berita, yang telah mendorong terjadinya *Arab Spring* dengan cara mereka sendiri. Hal ini bisa dikatakan karena Al Jazeera menjadi media berita pertama dan satu-satunya di region yang meliput peristiwa besar tersebut, sehingga publik yang butuh informasi terkait *Arab Spring* akan menyaksikan dan membaca liputan dari Al Jazeera. Selain itu, *Arab Spring* ternyata juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik domestik negara-negara di Timur Tengah yang mana hasilnya ialah tumbanganya beberapa rezim negara-negara Timur Tengah dan digantikan dengan rezim lainnya. Selain itu fenomena revolusi Arab ini telah berdampak pula pada hubungan politik regional antar negara, sebagaimana Al Jazeera pun memberikan dampak pada dinamika politik level regional ini. Bahkan berdampak terhadap hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi yang renggang. Sehingga dalam hal ini baik Al Jazeera maupun *Arab Spring* keduanya berdampak pada hubungan kedua negara tersebut. Dalam hal ini apakah bisa

dikatakan Al Jazeera memiliki perannya sendiri dalam kerenggangan hubungan kedua negara bertetangga tersebut? Apakah bahkan berperan mengeskalasi konflik keduanya hingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik tahun 2017 oleh Arab Saudi terhadap Qatar? Bab IV ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menjadi bab inti dari penelitian ini. Namun, sebelum secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut, akan dipaparkan bagaimana bentuk posisi baik Al Jazeera maupun Arab Saudi dan Qatar.

A. Peran Al Jazeera dalam Arab Spring dan Ancaman bagi Arab Saudi

Seperti yang sudah disebut di atas, bahwa Al Jazeera ialah aktor politik yang pada momentumnya ikut terlibat sebagai aktor yang berpengaruh terhadap dinamika politik di Timur Tengah. Termasuk pada peristiwa besar seperti *Arab Spring*. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada peran Al Jazeera di dalamnya. Al Jazeera telah menjadi saksi mata bahkan menjadi bukti (melalui rekaman) bagaimana *Arab Spring* dimulai dan bagaimana gambaran keresahan masyarakat terhadap rezim yang otoriter memuncak. Memang benar bahwa tuntutan sosial adalah akar dari musim semi Arab, karena protes pertama di Tunisia dimulai dengan alasan sosial dan pada awalnya dipimpin oleh serikat pekerja setempat. Namun, aspek politik revolusi kemudian muncul, dengan tuntutan yang jelas yaitu untuk menggulingkan rezim. Slogan utama dalam *Arab Spring* tersebut ('Rakyat ingin menggulingkan rezim'), yang dirumuskan pada tahap awal revolusi Tunisia, dengan cepat menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Dalam situasi seperti ini, Al Jazeera telah hadir untuk siap melaporkan kepada dunia bagaimana kondisi di dunia Arab sebenarnya. Jurnalis dan penerjemah Mohammed Lemine mengatakan bahwa

dengan adanya kehadiran Al Jazeera sangat berperan tidak hanya dalam segi melaporkan kisah tersebut tetapi juga, yang lebih penting, mempertahankannya (Abdelmoula, 2015, hal. 141).

Media-media arus utama di Timur Tengah tidak mampu untuk mengover isu ini baik karena kurangnya pengetahuan tentang media berita yang objektif maupun terkendala izin dari negara asalnya. Al Jazeera yang dari awal telah mendeklarasikan sebagai media berita independen, memiliki posisi yang strategis dalam hal mampu ikut terlibat dalam pertarungan publik terhadap ketidakadilan dengan cara meliputnya dan menyiarkan ke seluruh dunia. Termasuk keterlibatannya secara langsung pada hiruk pikuk gerakan revolusi Arab 2011. Dalam hal ini Al Jazeera telah membuktikan bahwa keberpihakannya kepada publik adalah mutlak dan membuktikan pula bahwa Al Jazeera punya pengaruh terhadap opini publik.

1. *Agenda-Setting* Al Jazeera soal Isu Revolusi Arab 2011

Sebagai media berita yang telah menisbatkan diri pada publik dan segala perjuangannya, fenomena *Arab Spring* perlu dilihat dari bagaimana Al Jazeera terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan bagaimana partisipasi Al Jazeera untuk mengover isu revolusi Arab ini yang kemudian disebarkan baik dalam bentuk siaran televisi maupun dalam bentuk tulisan berita di situs berita resminya. Beberapa program televisi Al Jazeera pada masa *Arab Spring* banyak mengarahkan pemberitaannya pada peristiwa tersebut, tidak terkecuali berita yang dirilis di situs berita resmi Al Jazeera yang berbahasa Arab, Aljazeera.net.

Berikutnya dari tulisan ini akan melihat seberapa besar partisipasi dan peran Al Jazeera dalam isu revolusi Arab 2011 ini.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II, melalui program-program televisi, Al Jazeera memiliki tujuan yaitu meliberalisasi media tradisional di Timur Tengah untuk menjadi sumber informasi tentang politik bagi publik yang tabu jika membicarakan soal itu. Dalam hal ini, pembicaraan terkait politik mendapatkan porsi yang banyak pada siaran Al Jazeera terlihat dari program politiknya seperti yang telah dijelaskan pada bab II. Dalam bentuk siaran televisi, Al Jazeera memiliki beberapa program televisi yang secara khusus membahas politik bahkan satu program khusus yang membahas terkait isu revolusi. Program-program tersebut ialah *The Opposite Direction*, *Without Borders*, *In the Depth*, dan satu program khusus tentang revolusi yaitu *Talk of the Revolution*. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Sam Cherribi dalam bukunya yang berjudul "*Friday of Rage: Al Jazeera, The Arab Spring, and the Political Islam*", Cherribi mengungkapkan bahwa pada rentang tahun 2011-2012 (yaitu pada masa peristiwa *Arab Spring* muncul dan menyita perhatian dunia), keempat program tersebut di atas banyak membahas soal isu *Arab Spring*. Untuk *The Opposite Direction*, program ini tercatat sebanyak 53 episode, dari total 71 episode yang tayang pada periode 2011-2012, yang membahas *Arab Spring* dalam rentang waktu hanya satu tahun. Bukan hanya itu, isu *Arab Spring* juga dibahas pada program televisi Al Jazeera lainnya. Seperti *Without Borders* yang tercatat menayangkan 44 episode dari total 73 episode yang tayang, *In the Depth* sebanyak 53 episode dari total 76 episode, dan terakhir *Talk of the Revolution* tercatat paling banyak yaitu ada 223 episode dari total 305 episode (Cherribi, 2017, hal. 28). Untuk jadwal penayangan program-

program tersebut, *The Opposite Direction*, *Without Borders*, dan *In the Depth*, tayang dengan jadwal mingguan, sehingga setiap minggu hanya tayang satu episode. Berbeda dengan program *Talk of the Revolution*, program ini tayang setiap hari pada periode 2011-2012, bahkan sampai tayang sebanyak dua kali atau lebih dalam satu hari. Jika ditotal secara keseluruhan, selama periode waktu 2011-2012 Al Jazeera telah membahas isu soal revolusi Arab 2011 dalam 373 episode. Intensitas pembahasan isu revolusi Arab oleh Al Jazeera ini membuat isu revolusi dan peristiwa *Arab Spring* menjadi isu publik yang wajar diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya, dalam hal ini, Al Jazeera telah menantang kultur tradisionalisme di Timur Tengah kala itu yang membungkam isu kontroversial terkait politik tersiar ke tengah-tengah masyarakat. Berikut beberapa contoh judul dari tayangan keempat program tersebut periode tahun 2011-2012.

Tabel 6. Judul Episode di Program Televisi Al Jazeera Tahun 2011-2012

Nama Program	No.	Judul Episode ⁶	Tanggal Penayangan
The Opposite Direction	1	Arab Peoples are Revolting	11 Januari 2011
	2	Lebanon and Syrian Revolution	08 November 2011
	3	Keeping the Flames of Revolutions Burning	29 November 2011
	4	A Special Episode of Arab Revolutions	03 Januari 2012
	5	A Year of Egyptian Revolution	24 Januari 2012
Without Borders	1	The Future of the Syrian Revolutions	05 Oktober 2011
	2	The Role of Women in Arab Revolutions	12 Oktober 2011
	3	The Impact of the Arab Revolutions on the Palestinian Cause	01 Februari 2012
	4	Challenge Facing the Libyan Revolution	15 Februari 2012
	5	The Impact of Arab Revolutions on Central Asian Muslims	26 September 2012
In the Depth	1	Reason for the Start of Tunisian Revolution	24 Januari 2011
	2	Yemen: The Edge of Revolution	19 September 2011
	3	The League of Arab Revolution	06 Februari 2012
	4	Reform and the Arab Spring	14 Mei 2012
	5	Democracy in the Arab Spring Countries	30 Juli 2012
Talk of the Revolution	1	The Course of Revolutions and the Role of the Working Class	01 Mei 2011
	2	Developments of the Yemeni and Libyan Revolution	25 Juni 2011
	3	The Revolution in Tunisia	21 Juli 2011
	4	The Arab Revolutions	14 Januari 2012
	5	The Syrian Revolution between the Deficit of Observers and the Difference of the Opposition	17 Juli 2012

⁶ Judul-judul episode dari program televisi Al Jazeera tersebut diterjemahkan dari bahasa Arab.
Sumber: aljazeera.net. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019.

Tidak hanya disiarkan melalui televisi, Al Jazeera juga mengover isu revolusi Arab ini melalui situs berita *online*-nya. Ada sangat banyak berita yang dirilis oleh Al Jazeera terkait *Arab Spring*, berikut merupakan beberapa contoh judul berita oleh Al Jazeera dari tahun 2011-2012, yang diambil melalui situs resmi Al Jazeera⁷.

Tabel 7. Judul Berita di Situs Al Jazeera Versi Arab selama tahun 2011-2012

No.	Judul Berita	Tanggal Rilis
1	Arab Popular Welcome to the Tunisian Revolution	16 Januari 2011
2	The Joy of Arab Popular Mubarak Departure	12 Februari 2011
3	Arab Appreciation of the Revolution of the Egyptian People	12 Februari 2011
4	The Revolution Takes the Arabs to New Stage	14 Maret 2011
5	Tahrir Square Uttered the Arab Revolution	03 April 2011
6	The Revolution of the Arabs and Turkey	07 Mei 2011
7	Arab and Turkish Revolutions	07 Juli 2011
8	Syrian Kurds with the Revolution	06 September 2011
9	Arab Revolutions Inspire the World's Youth	05 Oktober 2011
10	Haniyeh: Arab Spring Gave Victory to Gaza	22 November 2011
11	Tunisia: First Year of Revolution	14 Januari 2012
12	Sectarianism May Abort Arab Revolutions	29 Januari 2012
13	A Year After Syrian Revolution	15 Maret 2012
14	Syria National Revolution or Global Jihad?	18 Juni 2012
15	725 Palestinians Killed in Syria since Revolution	10 Desember 2012

Selama Al Jazeera meliput peristiwa *Arab Spring*, Al Jazeera menunda program-program rutinnnya agar biasa menayangkan siaran berita langsung dan wawancara terkait dengan peristiwa tersebut. Al Jazeera tidak hanya meliput satu peristiwa revolusi saja, tetapi terus beralih dari satu revolusi ke revolusi yang

⁷ Judul-judul berita diterjemahkan dari bahasa Arab dan diambil melalui aljazeera.net. Diakses pada 10 Oktober 2019.

lainnya tanpa jeda. Sehingga tayangan Al Jazeera tiap harinya selama *Arab Spring* telah dipenuhi dengan topik revolusi Arab. Bukan hanya program televisi dan tulisan berita, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam isu revolusi Arab ini, Al Jazeera bahkan membuat sebuah saluran televisi khusus yaitu Al Jazeera Mubasheer Misr (AJMM). AJMM ini khusus menayangkan berita langsung terkait revolusi yang terjadi di Mesir, yang mana diluncurkan pada tahun 2011 bertepatan dengan munculnya fenomena *Arab Spring*. Saluran televisi khusus ini menayangkan siaran langsung mengenai apa yang terjadi di Mesir terlebih saat terjadinya demonstrasi di Mesir. Selain itu, selama *Arab Spring* liputan Al Jazeera banyak diisi wajah-wajah para demonstran yang menyatakan tuntutan mereka kepada dunia. Para demonstran dan kaum revolusioner dalam aksi massa tersebut senang dengan kehadiran media yang berani seperti Al Jazeera, apalagi di tengah kontrol ketat pemerintah terhadap media untuk meliput peristiwa tersebut. Mereka bahkan memanfaatkan Al Jazeera untuk menjangkau dan memobilisasi orang-orang dari kalangan mereka (Hroub, 2011). *Arab Spring* yang merupakan peristiwa pemberontakan rakyat terhadap rezim otoriter yang korup dan menindas pada akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia bahkan telah mengejutkan hampir semua orang. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini karena pengaruh Al Jazeera yang telah menjadi suara bagi orang-orang yang tidak pernah didengar suaranya di seluruh Timur Tengah.

Perjuangan Al Jazeera untuk bisa meliput demonstrasi yang terjadi selama masa *Arab Spring* patut dilihat intensinya sebagai bentuk partisipasi aktif Al Jazeera dalam isu tersebut. Al Jazeera mengakui bahwa selama terjadi *Arab Spring* pemerintah di beberapa negara – contohnya Tunisia dan Mesir – menutup biro

mereka sehingga tidak akan ada berita baik di tulisan maupun tayangan televisi yang muncul membahas terkait isu tersebut. Tetapi ternyata publik lebih pintar ketimbang para penguasa. Aktivitas daring oleh publik selama masa tersebut telah membantu Al Jazeera mendapatkan rekaman kejadian baik berupa foto maupun video sehingga Al Jazeera masih tetap bisa menampilkan apa yang terjadi. Para pemuda demonstran mengunggah foto dan video yang memperlihatkan beberapa potongan kejadian seperti pasukan keamanan pemerintah sedang menembaki massa demonstrasi damai, tubuh orang terluka bernoda-noda darah di jalan-jalan dan rumah sakit, bahkan tubuh orang yang mati (Sultan, 2013). Inilah yang kemudian menjadi bahan bagi Al Jazeera sehingga masih tetap bisa mewartakan ke publik terkait demonstrasi selama *Arab Spring* meskipun biro mereka ditutup. Termasuk yang terjadi pada awal mula *Arab Spring*, yaitu di Tunisia. Bakar diri secara dramatis dari Mohammad Boazizi – seorang pedagang buah – di Sidi Bouzid, Tunisia, pada awalnya tidak dilaporkan oleh media mana pun, karena sekali lagi semua media ditutup oleh pemerintah. Barulah ketika foto-foto bakar diri itu diunggah ke media sosial, topik tersebut mencuat ke permukaan dan menjadi bahan pembahasan di media, terutama Al Jazeera (Sultan, 2013).

Pada permulaan revolusi Tunisia, yang memulai peristiwa *Arab Spring* di Timur Tengah, Al Jazeera telah menyiarkan rekaman video pembakaran diri Mohammad Boazizi, yang kala itu terjadi pada 17 Desember 2010 (Britannica, 2018). Ini merupakan bentuk protes Boazizi, bersama dengan sekelompok pelaku protes lainnya, mengenai ketidakadilan yang ia rasakan terhadap pemerintah. Pemerintah yang korup dan tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup, serta tindakan represif aparat adalah alasan tindakan tersebut terjadi. Sontak kejadian itu

menyadarkan dan membuat amarah masyarakat Tunisia, hingga memunculkan demonstrasi masyarakat pada 18 Desember yang menuntut turunnya rezim Ben Ali, Presiden Tunisia kala itu. Al Jazeera kemudian dengan berani membuat peristiwa demonstrasi tersebut sebagai topik dalam siaran televisinya, terlebih saluran televisi Al Jazeera versi Arab. Sehingga publik Arab bisa melihat apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya.

Terinspirasi gerakan tersebut, negara-negara Arab lain kemudian mengikuti pola yang sama yaitu adanya protes dengan pembakaran diri dan berdemonstrasi turun ke jalanan beramai-ramai. Salah satunya ialah Mesir yang pada bulan Januari 2011 (Britannica, 2019). Al Jazeera dalam hal ini, bisa dikatakan, berperan penting dalam menginspirasi gerakan revolusi di negara lain. Jika tidak ada media, dalam hal ini Al Jazeera, demonstrasi masyarakat yang membela Boazizi mungkin tidak ada. Bahkan jikalau media gagal membawa cerita pembakaran diri tersebut dari sudut pandang keresahan Boazizi ke khalayak publik, aksi pembakaran diri Boazizi tersebut mungkin akan teredam dan narasi yang muncul adalah hal tersebut adalah tindakan masyarakat yang mencoba melawan pemerintah. Al Jazeera membuat pembakaran diri oleh Boazizi itu menjadi memiliki cerita yang hidup, jika cerita itu mati dan bahkan tidak ada upaya untuk menghidupkannya, niscaya revolusi Arab pun akan mati sebagai akibatnya (Oifi, 2005, hal. 141). Matinya revolusi Arab pun kemudian akan mematikan harapan masyarakat untuk menyuarakan keinginan mereka dan harapan memiliki pemerintah yang lebih baik serta peduli terhadap hak-hak mereka.

Berbicara terkait demonstrasi di Mesir, Al Jazeera memang lebih banyak dan lebih siap meliput kejadian *Arab Spring* di negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya saluran Al Jazeera Mubasher yang khusus membahas fenomena revolusi Arab di Mesir, dan bahkan mengirim reporternya dikerahkan ke lapangan sebelum demonstrasi pertama terjadi dengan jumlah reporter yang banyak. Terutama demonstrasi yang terjadi di Tahrir Square, Mesir (Abdelmoula, 2015, hal. 149). Kepala biro Al Jazeera di Kairo saat itu, Abel Fattah Fayed, mengatakan bahwa biro Al Jazeera di Kairo tersebut sudah ditutup oleh pasukan polisi dari Hosni Mubarak, Presiden Mesir kala itu, pada tanggal 30 Januari 2011. Wartawan dan reporter Al Jazeera diusir dari biro tersebut dan pemerintah Mesir juga menyita kartu pers mereka. Hal ini dilakukan agar pemerintah kembali memiliki kendali terhadap berita yang muncul dan tersiar ke publik selama demonstrasi berlangsung. Meskipun biro Al Jazeera tersebut ditutup, Al Jazeera masih tetap bisa menyiarkan berita tentang demonstrasi yang terjadi di Kairo, Mesir. Hal ini kemudian disadari oleh pihak pemerintahan Mesir kala itu sehingga pihak kepolisian menjelajahi kota berusaha melacak kamera video Al Jazeera, bahkan memeriksa toilet di biro Al Jazeera Kairo untuk memastikan adakah kamera tersembunyi yang terpasang di sana. Fayed mengatakan bahwa meskipun Al Jazeera kesulitan untuk merekam kejadian demonstrasi di Tahrir Square, para pengunjung rasa bertindak sebagai koresponden dan reporter tidak resmi Al Jazeera dengan mengunggah foto-foto atau video-video yang berkaitan dengan demonstrasi saat itu di media sosial mereka, sama hal seperti yang terjadi di Tunisia. Rekaman melalui foto maupun video tersebut menjadi bahan bagi Al Jazeera untuk tetap menyiarkan perkembangan yang terjadi selama *Arab Spring* di Mesir dengan menambahkan narasi yang

menarik. Kawasan Tahrir Square telah menjadi biro berita dengan dukungan warga. Ruang redaksi seolah pindah dari gedung perkantoran ke jalan-jalan di kawasan Tahrir Square bersama para pengunjuk rasa (Cherribi, 2017, hal. 127). Tidak hanya bekerja sama dengan warga para pengunjuk rasa, Al Jazeera juga memutuskan untuk mencabut logo yang menempel pada peralatan mereka dan terus bekerja (Sultan, 2013).

Melalui kisah-kisah ini, dapat diakui bahwa Al Jazeera sangat berkomitmen dalam menjalankan tugasnya menjadi corong bagi aspirasi publik. Terlebih Al Jazeera dalam hal ini membuat liputan dengan sudut pandang demonstran baik itu dari sisi masyarakat sipil, oposisi, maupun kelompok-kelompok Islamis dalam demonstrasi tersebut. Ketika di Tunisia Al Jazeera banyak menayangkan liputan berita yang didapat dari kamera demonstran, di Mesir, Al Jazeera berani menayangkan liputan demonstran berupa gambar-gambar kerumunan orang yang marah dan kamar mayat beserta korban tindakan represif keamanan dari Mesir yang dipenuhi oleh darah (Miles, 2011). Selama *Arab Spring* di Mesir, Al Jazeera juga banyak memberikan ruang dalam liputan serta panggung siaran bagi Ikhwanul Muslimin (Qassemi, 2012), yaitu kelompok Islamis yang keras suaranya saat demonstrasi besar-besaran di Mesir. Al Jazeera juga tidak ingin kehilangan momen di mana publik akhirnya punya kesempatan mengisi ruang-ruang partisipasi publik dalam sosial dan politik yang kosong karena kontrol ketat pemerintah. Sebagaimana kesempatan mengisi ruang kosong partisipasi publik tersebut telah menjadi cita-cita Al Jazeera sejak kelahirannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada dukungan-dukungan dari Al Jazeera terhadap fenomena *Arab Spring* tersebut. Setelah 15 tahun sejak kelahiran Al Jazeera, media berita ini telah membuka ruang partisipasi

publik yang tertutup dan akhirnya publik memiliki peluang dan keberanian untuk mengisi ruang kosong itu melalui momentum *Arab Spring*.

Satu hal yang tak boleh luput ialah, publik tidak akan tahu dan bereaksi atas permasalahan sosial dan politik tanpa adanya pengetahuan soal hal tersebut, yang pada akhirnya berani diungkapkan oleh Al Jazeera kepada publik. Al Jazeera dalam merespons akar masalah pada *Arab Spring* juga dengan menyediakan ruang diskusi membahas topik tersebut melalui program televisinya dengan format debat dan bincang-bincang. Dalam hal ini Al Jazeera telah membuka ruang pendidikan soal sosial maupun politik kepada publik. Hal ini merupakan bentuk dari tujuan Al Jazeera dalam mencerahkan publik soal sosial dan politik, yang mana pada momentumnya membawa publik untuk lebih peka terhadap kondisi sosial bahkan politik mereka sendiri. Al Jazeera menyajikan dalam program-program bincang-bincangnya laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty Internasional, Human Rights Watch, Rporters sans frontières, tentang hak-hak masyarakat Arab yang harusnya terpenuhi. Layanan ini sangat penting dalam rangka melengkapi pengetahuan publik dan meningkatkan kesadaran mereka tentang berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia di dunia Arab. Kemudian pada momentumnya, yang dilakukan oleh Al Jazeera tersebut mampu membentuk opini publik dan mendorong publik juga ikut berpartisipasi menciptakan perubahan untuk kehidupan mereka sendiri, seperti yang dilakukan publik selama *Arab Spring* berlangsung. Membawa politik dan debat politik ke dalam ruang visual adalah salah satu blok bangunan dari sebuah kesadaran politik baru (Abdelmoula, 2015, hal. 141-142). Sama hal dengan membawa urusan sosial ke dalam televisi yang kemudian akan menimbulkan kepekaan sosial publik.

Dari berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Al Jazeera demi mampu mengover isu revolusi Arab tersebut dan menyiarkan ke publik secara luas, bisa dilihat bahwa Al Jazeera memiliki misi sendiri. Sebagaimana pendapat Steven Livingston, media (dalam hal ini seperti Al Jazeera) mampu menjalankan peran sebagai *agenda-setting agent*, yang mana media berita memberikan porsi besar dalam liputan dan tayangannya terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media tersebut, kemudian isu tersebut menjadi sorotan publik – mencuri perhatian publik, dan pada momentumnya publik melakukan suatu aksi dalam menanggapi isu tersebut. Dari definisi tersebut, bisa dikorelasikan dengan apa yang dilakukan Al Jazeera dalam hal isu *Arab Spring*. Al Jazeera sangat memberikan ruang kepada isu revolusi Arab dalam fenomena *Arab Spring* 2011. Hal ini dibuktikan dengan tayangan dalam program-program televisi Al Jazeera dan liputan berita di situs resmi aljazeera.net didominasi oleh topik tentang demonstrasi dan gerakan revolusi Arab yang terjadi selama masa *Arab Spring*. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Livingston, penekanan media berita terkait suatu isu menyiratkan bahwa sebuah isu dinilai penting oleh media tersebut yang pada momentumnya juga akan dianggap penting oleh publik sebagai konsumen dari tayangan dan tulisan berita tersebut. Dalam hal ini Al Jazeera menganggap bahwa isu revolusi Arab adalah isu penting yang penting untuk disebar ke publik secara luas. Semisal apa yang dilakukan oleh Al Jazeera dalam mengover dari kejadian protes pembakaran diri Mohammad Boazizi hingga demonstrasi di Tunisia. Bagi Al Jazeera yang memiliki cita-cita sebagai “*Voice of Voiceless*” (Al-Jazeera, 2019), isu tersebut penting untuk disebar ke publik sebagai bentuk mendukung adanya partisipasi publik terhadap isu-isu sosial dan politik, bahkan ekonomi, yang mana sebelumnya

itu hanya menjadi urusan pemerintah. Hal ini juga dibuktikan dengan bagaimana reporter Al Jazeera sangat berjuang dan berupaya demi bisa meliput demonstrasi masyarakat yang menjadi tanda meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu-isu yang dikatakan tabu di wilayah tersebut. Pada momentumnya, isu-isu yang ditekankan oleh Al Jazeera akan juga menjadi isu penting bagi publik. Hal ini yang kemudian bisa dibuktikan dengan menjalarnya aksi protes dari Tunisia ke negara-negara lain di Timur Tengah. Sehingga dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Al Jazeera telah menjalankan peran media sebagai *agenda-setting agent* pada peristiwa *Arab Spring*.

2. Arab Spring dan Al Jazeera: Ancaman bagi Arab Saudi

Arab Saudi termasuk dalam sekelompok kecil negara di Timur Tengah yang tidak terkena dampak signifikan dari *Arab Spring*. Bukan karena tidak ada upaya-upaya dari publik Arab Saudi untuk bisa menuntut pemerintah mereka, tapi karena pemerintah Arab Saudi cukup pandai meredam ‘berisik’ dari para demonstran. Protes yang dilakukan massa di Arab Saudi mungkin berbeda dengan massa *Arab Spring* di negara lain. Tuntutan dari para demonstran sangat beragam. Ada yang menuntut agar Arab Saudi membebaskan tahanan politik yang tidak bersalah, menuntut hak perempuan, protes terhadap pemerintah yang korup, protes terhadap pengangguran, protes terhadap perlakuan anti-Syiah, dan lain sebagainya. Protes tersebut dimulai pada Januari 2011 ditandai dengan protes bakar diri seorang lelaki paruh baya berumur 60 tahun di Samitah, Arab Saudi (BBC, 2011), persis dengan cara protes pionir gerakan revolusi Arab, Boazizi, di Tunisia.

Bisa dikatakan bahwa *Arab Spring* yang kemudian menjalar ke negara-negara non-demokrasi lain di Timur Tengah, tidak dapat dipungkiri besar dampaknya. Demonstrasi yang memakan korban, keburukan rezim yang tersebar ke publik dunia, serta kegagalan dalam mengontrol masifnya demonstrasi massa yang berujung penggulingan rezim, jelas sangat tidak diharapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahkan sangat dihindari. Hal ini dikarenakan *Arab Spring* mengancam posisi Arab Saudi sebagai kekuatan regional di Timur Tengah. Sehingga demi menjaga posisi sebagai kekuatan regional tersebut, Arab Saudi perlu untuk membuat dan menjaga stabilitas keseimbangan sistem yang berjalan di wilayah regionalnya dengan menjaga segala kekuatan yang ada (Richter, 2014, hal. 177-187), termasuk meredam kekuatan publik yang secara konsep berseberangan dengan kekuatan pemerintah atas publik. Dalam hal ini Arab Saudi memiliki tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara regional, yaitu mencegah munculnya kekuatan baru dalam subregional Timur Tengah dengan cara mengatur antara potensi ancaman dan tantangan dalam tingkatan regional, bahkan secara global dengan cara menstimulasi. Arab Saudi juga memperhatikan kebijakan dalam negerinya, karena ancaman untuk pergeseran posisi Arab Saudi sebagai kekuatan juga mungkin terjadi dikarenakan ancaman-ancaman domestik. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Arab Saudi negara yang kuat dan memiliki dominasi yang sulit tergeser.

Menghindari ancaman kekuatan baru dari tingkat domestik dan regional, Arab Saudi menganggap penting berada pada posisi sebagai negara kontra-revolusi. Yang mana ia punya premis jikalau Arab Saudi mengiyakan revolusi maka Arab Saudi telah mengakui kehadiran kekuatan baru yang mempengaruhi dominasinya.

Wajar jika pada momentumnya Arab Saudi sangat ketat mengontrol kekuatan lain yang akan muncul melalui ide-ide revolusi, contohnya seperti peristiwa *Arab Spring*. Arab Saudi sangat menutup kesempatan dan membatasi adanya ide bahkan aktivitas yang reformis. Sering kali aktivis-aktivis reformis dipenjara, baik itu yang datang dari kaum intelektual, penulis, *blogger*, termasuk orang-orang yang hanya menulis surat kepada raja meminta reformasi dilaksanakan. Termasuk pembatasan pers. Arab Saudi juga membatasi aktivitas media dan pers. Sebagai contoh tahun 1996 ketika jaringan BBC versi Arab yang bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi menyiarkan sebuah wawancara dengan Muhammad Al Mas'ari, salah seorang penentang kebijakan Arab Saudi yang melawan himbuan dari keluarga kerajaan Saudi. Masalah lainnya yaitu ketika BBC Arab ingin menyiarkan film dokumenter yang mengkritik sistem peradilan di Arab Saudi seperti hukum cambuk dan pemenggalan leher, pemodal Saudi malah mengganti siaran tersebut dengan *Disney Channel* (Rushing, 2007, hal. 120-121). Buntut dari hal ini ialah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan BBC versi Arab ini beroperasi, yang mana kemudian jaringan ini dibeli oleh Sheikh Emir Hamad, emir Qatar, sebagai cikal bakal Al Jazeera.

Termasuk *Arab Spring*, yang sarat akan upaya melemahkan kendali dan kekuatan pemerintah, Arab Saudi berupaya menjaga agar sistem regional tetap stabil dengan memberi dukungan dana maupun militer kepada negara-negara – sahabat – di Timur Tengah yang terdampak gelombang protes *Arab Spring*. Misalnya Arab Saudi memberikan dukungan berupa dana bantuan darurat hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) kepada Bahrain dan Oman, sebagai upayanya mempertahankan basis kekuasaan monarki tradisional dalam GCC. Kemudian

Arab Saudi juga memberikan dana darurat sebesar 5 miliar dolar AS kepada junta militer di Kairo, setelah Mohammad Morsi terpilih sebagai presiden Mesir (Richter, 2014). Hal ini jelas dilakukan oleh Arab Saudi untuk menurunkan pengaruh Ikhwanul Muslimin dari kekuasaan di Mesir.

Karena menyadari ancaman terhadap stabilitas kekuasaan di tingkat domestik juga ada selama *Arab Spring*, Arab Saudi merespons sama dengan apa yang dilakukan pada tingkat regional, yaitu dengan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia Arab Saudi memberikan bantuan dana. Pertama-tama Arab Saudi merespons aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah Arab Saudi dengan memberikan dana sekitar 37 miliar dolar AS bagi sektor masyarakat yang paling rentan atau berpotensi memberontak. Sektor tersebut seperti kaum muda dan orang miskin. Lowongan pekerjaan diciptakan dan subsidi untuk perumahan disediakan. Tidak hanya sekali, Arab Saudi menggelontorkan dana lagi, bahkan yang lebih besar jumlahnya, sebulan setelah bantuan pertama. Yaitu sebesar 93 miliar dolar AS, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan juga memberikan gaji ekstra untuk pegawai negeri (Lacroix, 2014). Selain merespons dengan menggunakan wortel, Arab Saudi juga menggunakan tongkat pemukul. Beberapa aktivis yang ikut dalam demonstrasi di Arab Saudi ditahan oleh pihak keamanan pemerintah, dan beberapa lainnya diancam akan ditangkap jika mereka mengumumkan dukungan kepada gerakan-gerakan membangkang pemerintah. Polisi berada di jalan-jalan dalam jumlah yang sangat besar, dan pos-pos pemeriksaan didirikan untuk mencegah siapa pun yang berani mencoba mencapai lokasi di mana demonstrasi terjadi. Intelijen Saudi juga aktif di internet. Menurut

beberapa aktivis yang menggunakan media sosial Facebook, beberapa halaman Facebook telah dihancurkan, sementara beberapa akun diretas (Lacroix, 2014).

Al Jazeera yang pada kenyataannya memang menjalankan peran media sebagai *agenda-setting agent* dalam isu revolusi Arab selama Arab Spring, cukup mengganggu dan mengancam posisi Arab Saudi sebagai kekuatan regional. Al Jazeera melalui berbagai aktivitasnya di awal mula kemunculan *Arab Spring*, yaitu aksi protes masyarakat di Tunisia, telah menjadi ‘bubuk mesiu’ dan menghasilkan aksi protes dengan massa yang lebih besar. Bahkan aksi tersebut ditiru oleh publik negara lain demi menuntut rezim di negara mereka yang juga tidak memimpin dengan adil sebagaimana rezim di Tunisia. Hal ini yang kemudian membuat Arab Saudi kemudian sangat menolak bahkan membenci Al Jazeera.

Penolakan Arab Saudi terhadap Al Jazeera tidak mulai terjadi pada fenomena *Arab Spring* 2011, bahkan dari jauh sebelumnya. Al Jazeera di awal-awal kemunculannya dikritik oleh para pejabat Arab Saudi melalui pers Arab Saudi dengan kritik yang ganas. Pejabat Arab Saudi tersebut mengkritik program Al Jazeera yang memuat isu-isu Islam, Nabi Muhammad, dan Al Qur’an dengan format yang sangat berani. Hal tersebut telah memancing kemarahan para intelektual di Arab Saudi. Pada 14 Maret 1998, dua tahun setelah kelahiran Al Jazeera, seorang ulama terkemuka di Arab Saudi menulis tanggapannya soal Al Jazeera dalam sebuah surat kabar harian Arab Saudi (yang kebetulan memiliki nama Arab yang sama dengan Al Jazeera). “Bagaimana bisa pejabat Al Jazeera mengizinkan serangan terhadap agama Islam dan Al Qur’an ditayangkan secara langsung kepada pemirsa? Berani-beraninya program Al Jazeera menjamu seorang

ateis untuk berbicara tentang agama suci kita dan menjadikannya lelucon atas nama kebebasan berbicara? Bisakah Anda bayangkan apa dampak semua yang akan terjadi pada anak-anak Arab dan Muslim? Bisakah Anda bayangkan pengaruhnya terhadap pemirsa yang tidak memiliki informasi tentang agama dan budaya Islam?”. Para Ulama Arab Saudi memuji keputusan Arab States Broadcasting Union (ASBU) yang menolak permohonan keanggotaan Al Jazeera dalam kelompok tersebut (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 116).

Di tahun 1999 Arab Saudi membuat sebuah larangan yang informal namun tegas pada semua perusahaan yang beriklan di saluran Al Jazeera. Tindakan ini akan membuat Al Jazeera tidak mendapatkan pemasukan finansial dari perusahaan yang bekerja sama dengan Al Jazeera untuk mengiklankan perusahaan mereka (Powers, 2009, hal. 108). Tahun 2011 wakil direktur informasi kedutaan Arab Saudi di Wahington, Nail Al-Jubeir mengatakan bahwa wartawan asing dapat datang ke Arab Saudi dan meliput berbagai masalah. Tetapi mereka tidak dapat mendirikan biro di Arab Saudi. Ia tidak memungkiri bahwa saat itu Arab Saudi juga perlu untuk memanggil Al Jazeera dalam acara mereka yang diadakan di Washington. Namun Al-Jubeir juga tidak bisa menafikan bahwa Arab Saudi memiliki standar pemberitaan sendiri. Al-Jubeir mengatakan Al Jazeera memiliki sisi positif dan negatifnya. Namun pernyataan ini jauh sebelum bagaimana kemelut konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar yang dikarenakan oleh aktivitas Al Jazeera. Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa Arab Saudi tidak sepakat dengan keberanian Al Jazeera dalam menyebarluaskan kritik kepada pemerintah, yang mana menurut Arab Saudi akan menimbulkan kekacauan domestik.

Orang-orang Arab Saudi yang berkuasa geram dengan program yang berani berpikir bebas seperti itu menyerang setiap rumah dengan parabola murah. Para pejabat Arab Saudi, tampaknya, merasa bahwa dominasi mereka atas media berita regional telah melemah dan sedang terkikis oleh meningkatnya popularitas dan pengaruh Al Jazeera (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 115). Sehingga Arab Saudi dalam hal ini berupaya untuk menghentikan, atau setidaknya melemahkan, pengaruh Al Jazeera, meski harus dengan menarik duta besar Arab Saudi dari Qatar sebagai bentuk ketegasan Arab Saudi untuk menyikapi kritik yang dilontarkan Al Jazeera terhadap Arab Saudi. Arab Saudi juga membuat media berita tandingan untuk melemahkan pengaruh Al Jazeera yaitu Al Arabiya pada tahun 2003. Setelah berbaikan pada tahun 2007, Arab Saudi dan Qatar masih terus menjalin hubungan yang baik. Pada tahun 2008, dilansir dari New York Times, Arab Saudi memberi tanda kepada Al Jazeera bahwa mereka diizinkan untuk membuka biro di Arab Saudi. Hal ini tentu saja dengan syarat, Al Jazeera harus mengurangi kritik dalam liputannya terhadap Arab Saudi. Staf Al Jazeera menceritakan pada New York Times, bahwa semenjak hubungan antara Qatar dan Arab Saudi kembali baik, mereka mengakui bahwa semua suara-suara pembangkangan dan kritik kepada Arab Saudi menghilang dari layar Al Jazeera (Worth, 2008).

Kemudian selama lima tahun tidak ada konfrontasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Al Jazeera, sampai pada tahun 2013 Al Jazeera kembali mendapatkan sorotan oleh Arab Saudi. Sorotan ini ialah karena aktivitas Al Jazeera yang dinilai menyebabkan kekacauan dan konflik dalam negeri di beberapa negara-negara Timur Tengah – yang punya hubungan sangat dekat dengan Arab Saudi, tentu saja ini soal aktivitas liputan Al Jazeera selama *Arab Spring*. Arab Saudi

dalam hal ini memperingati Al Jazeera melalui pembuatan perjanjian dengan negara Qatar, yaitu Riyadh Agreement. Perjanjian ini berisi berbagai macam hal yang perlu disepakati oleh Qatar, dan terkait Al Jazeera termasuk di dalamnya. Selang satu tahun yaitu pada tahun 2014, Arab Saudi kembali memperingati lebih tegas kepada Al Jazeera, masih sama yaitu dengan menggunakan perjanjian dengan Qatar dan ditandatangani juga oleh negara teluk Arab lainnya. Hal ini dikarenakan Al Jazeera masih membuat tayangan yang terkesan menyerang rezim negara-negara Timur Tengah. Peringatan tegas kali ini sempat dibarengi dengan pemanggilan duta besar Arab Saudi, lagi, dari Qatar selama beberapa bulan hingga akhirnya kesepakatan baru muncul dan disetujui pula oleh Qatar. Namun konflik kembali terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang mana kali ini Arab Saudi bersikap jauh lebih tegas yaitu dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Al Jazeera dalam konflik ini kembali ikut menjadi sorotan Arab Saudi. Pada hari pemutusan hubungan diplomatik terhadap Al Jazeera pada 5 Juni 2017, Arab Saudi juga telah menarik lisensi Al Jazeera untuk beroperasi di Arab Saudi (Al-Jazeera, 2017). Menyusul tindakan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2017, Arab Saudi melarang hotel dan fasilitas wisata di Arab Saudi untuk menayangkan saluran berita Al Jazeera dan mengancam akan menghukum pelanggar dengan penutupan fasilitas mereka dengan mencabut lisensi hotel dan denda hingga 26 ribu dolar (Al-Jazeera, 2017). 17 Juni 2017, akun Twitter utama milik Al Jazeera versi Arab – dengan 12 juta pengikut – ditangguhkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi bahkan menuntut agar setiap warga negara Arab Saudi yang bekerja untuk Al Jazeera mengundurkan diri. Sehingga pada 21 Juni 2017, Al Jazeera harus kehilangan pembawa acara terbaik

mereka, Ali Dhufairi, yang merupakan pembawa acara program *In the Depth* (Alaraby, 2017).

Dari paparan di atas, membuktikan bahwa Arab Saudi dan Al Jazeera didominasi hubungan yang tidak baik, bahkan sebelum *Arab Spring*. Meskipun dari tahun 2007 sampai sebelum fenomena *Arab Spring* terjadi dan tahun 2013 Arab Saudi memperingati Al Jazeera atas liputannya keduanya masih baik-baik saja. Bisa dikatakan bahwa, fenomena *Arab Spring* yang mana cukup sensitif bagi rezim-rezim negara Timur Tengah yang tidak demokratis, serta peran Al Jazeera sebagai media berita yang mendukung gerakan revolusi Arab tersebut – apalagi Al Jazeera merupakan media berita yang sudah punya pengaruh di Timur Tengah – telah menjadikan ancaman serius bagi Arab Saudi. Memang tidak menyerang secara langsung, tapi pengaruhnya cukup terasa oleh Arab Saudi, melalui negara-negara sahabat Arab Saudi yang sudah kacau karena adanya kolaborasi Al Jazeera dan *Arab Spring* itu. Porsi kekuatan regional dan keseimbangan stabilitas sistem di Timur Tengah yang dipegang oleh Arab Saudi mau tidak mau menemui lawannya. Sehingga jelas, Arab Saudi dalam hal ini akan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan adanya hegemoni pengaruh baru, atau setidaknya melemahkannya. Tak peduli bagaimanapun caranya pasti dilakukan oleh Arab Saudi, bahkan jika harus dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang merupakan negara basis dari Al Jazeera tersebut.

B. Dukungan Qatar terhadap Al Jazeera

Upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk melemahkan pengaruh Al Jazeera sudah cukup bervariasi. Upaya terakhir, bisa dikatakan juga upaya paling

tegas, dari Arab Saudi ialah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar – negara basis Al Jazeera. Namun, dalam hal ini perlu adanya penjelasan lebih terkait bagaimana bentuk hubungan antara Qatar dan Al Jazeera sehingga Arab Saudi harus mempertaruhkan hubungannya dengan Qatar untuk meredam Al Jazeera. Berikut di bawah akan dijelaskan terkait hubungan Qatar dan Al Jazeera dan bagaimana kaitannya dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017.

1. Hubungan Qatar dan Al Jazeera

Al Jazeera tidak bisa memungkiri bahwa konfrontasi terhadapnya bisa berdampak pada hubungan luar negeri Qatar dengan negara lain. Memang cukup berat untuk menjadi yang independen dan bebas ketika lingkungan politik yang tidak mendukung hal tersebut ada. Beda hal dengan pandangan Qatar yang lebih mendukung adanya media berita independen. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apa yang membuat Qatar memiliki pandangan berbeda soal media? Bagaimana bentuk hubungan antara Al Jazeera dengan Qatar sebenarnya? Ini juga yang kemudian banyak dipertanyakan oleh pengamat dan ilmuwan media-politik mengenai hubungan keduanya. Untuk melihat bagaimana bentuk hubungan antara Al Jazeera dengan Qatar, sangat mudah jika dengan menceritakan tentang pemimpin Qatar yang memiliki ide mendirikan Al Jazeera. Sehingga di bawah ini akan diceritakan secara singkat tentang Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani yang merupakan Emir (atau bisa dikatakan Presiden) dari Qatar merupakan pemimpin yang progresif dan cukup kontroversial. Sejak awal kelahiran Al Jazeera, Sheikh Emir Hamad memang

mengharapkan sebuah media yang mirip seperti CNN (berani mengkritik dan profesional), sebuah media berita asal Amerika Serikat. Namun media tersebut harus lebih berfokus pada isu-isu yang berhubungan langsung dengan dunia Arab serta perspektif Arab yang independen (Powers & Gilboa, 2007, hal. 55). Dalam hal ini dibuktikan dengan Sheikh Emir Hamad, yang sebagai Presiden Qatar, memberi dana awal untuk peluncuran Al Jazeera sebesar \$ 147 dan menyubsidi Al Jazeera selama lima tahun hingga November 2001 (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 34). Hal ini adalah sebagai bentuk bagian dari langkah kecil untuk memperkenalkan demokrasi ke negara kecilnya dan diharapkan bertindak dalam demokratisasi di wilayah Timur Tengah. Namun, meskipun Sheikh Emir Hamad berharap Al Jazeera menjadi mandiri secara finansial dan mendapat iklan, faktanya pemerintah Qatar telah menghabiskan sekitar \$ 100 juta setiap tahun untuk mempertahankan jaringan yang saat itu belum mendapatkan banyak iklan⁸.

Apa yang akan membuat raja Arab seperti Sheikh Hamad ingin memperkenalkan demokrasi dan memberikan kebebasan informasi di dalam negara yang kecil seperti Qatar tersebut? Orang mungkin dapat berspekulasi bahwa kebijakan Sheikh Emir Hamad dikarenakan latar belakang pendidikannya di Britania Raya, di mana ia lulus dari Royal Military Academy di Sandhurst pada tahun 1971. Dengan latar belakang militer ini, banyak perhatian politik Sheikh Emir Hamad yang berorientasi pada militer dan keamanan. Sebelum mengangkat dirinya sebagai emir, Sheikh Emir Hamad aktif dalam memodernisasi baik infrastruktur militer maupun fisik dan ekonomi negara Qatar. Tahun 1977 ia diangkat sebagai

⁸ Data saat itu diambil pada tahun 2003.

Putra Mahkota, di mana ia juga ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Di bawah arahnya, pasukan militer Qatar berpartisipasi dalam serangan Koalisi terhadap Irak setelah invasi ke Kuwait pada tahun 1990. Juni 1995, beliau mengambil alih pemerintahan Qatar dengan mengkuadeta (dengan damai tanpa kekerasan) ayahnya sendiri, Sheikh Khalifa. Saat itu ayahnya sedang berada di Jenewa (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 35). Setelah menjabat sebagai Emir, Sheikh Emir Hamad bahkan mengizinkan semua warga negara di atas usia delapan belas tahun, termasuk perempuan, untuk ikut menjadi pemilih di pemilihan kota. Masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang menggambarkan bahwa Sheikh Emir Hamad berupaya untuk meliberalisasi sistem di Qatar.

Salah satu hasil dari upaya liberalisasi Qatar oleh Sheikh Emir Hamad ialah Al Jazeera dengan program televisinya. Al Jazeera bisa membuat identitas dan ciri khas medianya melalui program acara perdana yang diluncurkan di masa awal kelahirannya, selain laporan berita, yaitu *The Opposite Direction* dan *Sharia and Life (Al Shari'a wal Hayat)*. Format dari *The Opposite Direction* sudah dijelaskan dalam sub bab Program Politik Al Jazeera. *Sharia and Life* merupakan sebuah acara bincang-bincang khusus yang membahas tentang topik-topik dalam kehidupan sehari-hari dan dibahas dalam sudut pandang agama Islam. Inilah yang kemudian membuat menarik program tersebut. Program ini bahkan juga membahas mengenai kesesuaian demokrasi dengan Islam, perihal status perempuan dalam Islam, perihal isu sosial, ekonomi, dan topik-topik terhangat lain yang menjadi perbincangan kala itu, dengan tetap dipandang dari sudut agama Islam. Topik acara bincang-bincang seperti itu sangat tabu di dalam kultur masyarakat Timur Tengah kala itu. *Sharia and Life* diisi oleh Yusuf Al-Qardhawi sebagai pembicara tetap di acara tersebut.

Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang pemuka agama yang ternama berasal dari Mesir. Beliau telah menjadi seorang warga negara Qatar melalui naturalisasi, atas permintaan pemerintah Qatar sendiri.

Segala bentuk hubungan pemerintah Qatar di awal, bahkan sampai selama perjalanan Al Jazeera, memang tidak dapat dipungkiri saling terkait satu sama lain. Dimulai dengan ide membeli BBC versi Arab yang ditutup oleh Arab Saudi untuk dijadikan organisasi media berita milik Qatar yang inisiatif dari Sheikh Emir Hamad, dalam hal ini pemerintah Qatar, sendiri. Namun, Al Jazeera mengatakan bahwa untuk urusan editorial secara independen di dalam wewenang dari Al Jazeera sendiri. Faisal Al Kasim, pembawa acara *The Opposite Direction* mengatakan bahwa kebijakan editorial Al Jazeera sangat longgar sehingga ia tidak pernah diberi perintah mengenai konten program.

“My program is the most controversial show on the network, but no one interferes. I choose the subjects, and I choose the guests. No one has ever influenced my decision. The network has an even wider scope of freedom than the BBC Arab Radio. I tackle issues that I never even dreamed of covering during my service at the BBC” (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 97).

Seorang pembawa acara dari Strait Talk, Ali Mustafa, mewawancarai seorang direktur dari Direktur Manajer Al Jazeera English, Gils Trendle, dan ditayangkan dalam siaran Youtube tahun 2018. Trendle menyebutkan bahwa Al Jazeera berupaya untuk objektif dalam menyampaikan berita. *“We reporting the event around the world factually and farankly. We are journalist, our job is to cover what’s happening in the world, we do it in an objective way, we do it in a professional way, we stand by the credibility and the integrity of our journalism”* (StraitTalk, 2018).

Menurut Al Jazeera, mereka adalah media berita yang independen. Satu-satunya koneksi ke pemerintahan Qatar ialah soal pendanaan Qatar kepada Al Jazeera. Di luar itu, Al Jazeera independen dari segi editorial (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 43). Namun beberapa pengamat menilai bahwa Al Jazeera tidak benar-benar independen, mereka pesimis tentang hubungan Al Jazeera dengan pemerintah Qatar. Mohammed Arafa, seorang ahli komunikasi dan mantan Ketua Departemen Komunikasi Universitas Qatar mengatakan bahwa pemerintah Qatar menggunakan Al Jazeera sebagai alat *public relation* untuk berhadapan dengan dunia luar. Hal ini menjadi meyakinkan ketika mengetahui fakta bahwa Al Jazeera yang banyak mengkritik sebagian besar rezim Arab tetapi hampir tidak menyentuh politik domestik di Qatar. Seolah Al Jazeera menghindari untuk menayangkan ‘cuci kotor’ Qatar, padahal banyak hal-hal yang bisa dikritisi oleh Al Jazeera terhadap negara yang membiayainya tersebut (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 86). Al Jazeera menanggapi hal tersebut dengan berpendapat bahwa Qatar merupakan negara kecil dengan sedikit bahan untuk berita serta kenyataan bahwa peristiwa lokal biasanya berada di baris kursi belakang setelah berita-berita besar dunia dan isu yang menyangkut Timur Tengah. Padahal Al Jazeera bahkan meliput peristiwa politik di wilayah terpencil seperti di Bahrain (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 84). Argumen lainnya terkait posisi Al Jazeera tersebut ialah mereka tidak seperti banyak media berita lain yang dikelola oleh pemerintah di Timur Tengah, bukan entitas dari pemerintah, melainkan jaringan transnasional dan pan-Arab yang berfokus pada peristiwa-peristiwa dari dunia Arab dengan target sasaran ialah publik di dunia Arab. Namun dalam hal ini, sekali lagi, Al Jazeera lebih banyak mengundang pihak-pihak oposisi negara lain ketimbang terhadap Qatar

dalam program televisinya. Sehingga, meskipun Al Jazeera mengklaim intensinya adalah melayani penonton Arab, tetapi di sisi lain Al Jazeera telah menguasai seni dalam menetapkan agenda politik (El-Nawawy & Iskandar, 2003).

Beberapa pengamat melihat Al Jazeera sebagai alat politik yang digunakan oleh pemerintah Qatar secara tidak langsung untuk melayani tujuan kebijakan luar negerinya. Hilal Khashan, seorang sarjana Palestina-Amerika terkemuka dan profesor di Departemen Studi Politik dan Administrasi Publik di American University of Beirut berkomentar bahwa Al Jazeera tidak pernah benar-benar dipahami sebagai proyek media. Al Jazeera merupakan proyek politik. Tegasnya, Al Jazeera menjadi perpanjangan tangan dari negara Qatar. Qatar menginginkan sesuatu yang dapat meningkatkan prestise dan memberikan kekuatan serta pengaruh yang kuat (Sultan, 2013).

Ini soal peristiwa di tahun 2002. Pada tahun tersebut Putra Mahkota Abdullah dari Arab Saudi memutuskan membuat solusi terkait konflik antara Palestina dan Israel yang dinamakan Arab Peace Initiative atau API (Centerpeace.org, 2019). Al Jazeera dalam hal ini menanggapi dengan menyiarkan *The Opposite Direction* yang membahas terkait pembentukan API ini. Dalam acara yang dipandu oleh Faisal Al Kasim tersebut, mengundang dua orang partisipan yang hadir secara langsung yaitu Mohammed Abdel Hakam Diab, yang merupakan seorang jurnalis dan penulis, dan Fahad Al-Orabi Al-Harthy yaitu anggota dari Majelis Syuro Arab Saudi. Dalam acara tersebut Mohammed Abdel Hakam mengatakan bahwa “kebijakan Arab Saudi membuat kesalahan, kadang-kadang mencapai kejahatan” (lorientlejour.com, 2002). Di pertengahan acara tersebut

kemudian bergabung Sa'ad Al Faqih melalui telekonferensi dari London. Beliau adalah seorang pendiri *Movement for Islamic Reform in Arabia* (MIRA), yaitu sebuah organisasi oposisi Arab Saudi yang berbasis di Inggris. Dalam hal ini bisa dikatakan Al Jazeera berani mengundang seorang pembangkang pemerintah muncul di televisi. Hal tersebut dinilai sangat kontroversial, terutama bagi keluarga Kerajaan Arab Saudi yang menganggap hal tersebut sebagai pencemaran nama baik. Buntut dari hal tersebut Arab Saudi harus menarik duta besarnya dari Qatar di tahun yang sama (BBC, 2002). Bisa dikatakan penarikan duta besar ini adalah kali pertama dilakukan Arab Saudi kepada Qatar. Hubungan keduanya merenggang selama hampir lima tahun, tahun 2007 keduanya sepakat untuk memperbaiki dan menjalin hubungan yang lebih baik.

Mustafa Alani, seorang analis keamanan di Pusat Penelitian Teluk di Dubai mengatakan bahwa sebelum perbaikan hubungan antara Qatar dan Arab Saudi, yang setelah 5 tahun merenggang, pada tahun 2007 Qatar telah bertemu pada September dengan Arab Saudi di Riyadh untuk setuju memberi jaminan kepada Arab Saudi tentang liputan Al Jazeera (Worth, 2008). Mungkin sedikit mengkhianati, tapi faktanya berbicara bahwa pada pertemuan antara Qatar dan Arab Saudi pertama, setelah sekian lama Arab Saudi menarik duta besarnya tahun 2002, Qatar membawa tamu spesial yaitu ketua dewan Al Jazeera Sheikh Hamad bin Thamiir Al-Thani. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari Manajer Umum Al Jazeera, namun staf Al Jazeera membenarkan bahwa ketua dewan telah menghadiri pertemuan tersebut (Worth, 2008). Dampak dari hal ini kemudian segera terasa di Al Jazeera. Staf Al menambahkan, bahwa terjadi perubahan di ruang redaksi setelah pertemuan itu. Al Jazeera tidak lagi berbicara negatif soal Arab Saudi (Worth,

2008). Perubahan di Al Jazeera tersebut adalah bagian dari rekonsiliasi yang lebih luas antara Arab Saudi dan Qatar yang lebih luas. Pasalnya pada bulan Desember 2007, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud Al-Faisal, mengumumkan bahwa Arab Saudi akan mengirimkan duta besar kembali ke Qatar untuk pertama kalinya setelah penarikan pada tahun 2002. Dalam hubungan baik ini, Arab Saudi bahkan telah mengindikasikan izin pembukaan biro Al Jazeera di Riyadh sebagaimana yang sudah dibahas sub bab sebelumnya.

Kemudian dalam kasus *Arab Spring*, Qatar memainkan peran yang besar dalam fenomena tersebut. Qatar menganggap bahwa *Arab Spring* mewakili kesempatan yang sempurna untuk menggeser keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Karena itu para penguasa Qatar menjalankan dua strategi yaitu merajut jaringan dengan kelompok Islamis serta revolusioner dan membangun kekuatan media berita, dalam hal ini Al Jazeera (Cherkaoui, 2014). Hal ini kemudian dibuktikan dengan bagaimana Qatar berpihak pada kelompok gerakan Islamis dan revolusioner dalam peristiwa *Arab Spring* di berbagai negara-negara Arab. Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab III, pada peristiwa Revolusi Melati di Tunisia, Qatar mendukung oposisi rezim yang saat itu diwakilkan partai *Ennahdha*. Kemudian di Mesir, Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin yang menuntut terjadinya revolusi di Mesir. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin ini dengan bantuan dana kepada salah satu anggotanya yang terpilih sebagai presiden Mesir, yaitu Mohammad Morsi (Qassemi, 2012). Di Libya, Qatar mendukung *National Transitional Council* (NTC) yang merupakan badan pemerintahan Libya sementara sebagai tandingan bagi pemerintahan Khadafi. Dalam badan tersebut berisi pasukan dari *The Libyan Islamic Fighting Group* atau biasa dikenal sebagai

Al-Jama'ah al-Islamiyah al-Muqatilah bi-Libya, yang merupakan kelompok Islamis bersenjata yang juga ikut terlibat dalam perang di Libya 2011. Dalam hal ini, Qatar memberikan dukungan dari segi bantuan militer kepada NTC untuk melawan pasukan militer pro pemerintahan Khadafi (Fraihat, 2011). Dalam hal ini Qatar telah menjalankan strateginya yaitu menjalin hubungan dengan kelompok revolusioner dan Islamis di negara-negara yang kala itu tengah berada pada krisis stabilitas politik. Kebijakan luar negeri Qatar bisa dikatakan lebih agresif saat merespons peristiwa *Arab Spring*, jika dibandingkan dengan kebijakan yang diambil pada peristiwa lain. Qatar yang sebelumnya memosisikan dirinya sebagai mediator peleraai konflik di antara beberapa kasus antar negara atau antar kelompok, berubah menjadi negara yang terlibat dalam konflik itu sendiri, khususnya dalam hal ini peristiwa *Arab Spring* (Khatib, 2013).

Dalam konteks strategi Qatar dalam *Arab Spring*, selain menjalin relasi dengan kelompok revolusioner dan kelompok Islamis seperti dijelaskan di atas, Qatar juga membangun kekuatan media. Hal tersebut dijelaskan dengan bagaimana Al Jazeera mengcover peristiwa *Arab Spring*. Fadi Salem, seorang peneliti media Arab yang berbasis di Dubai, mengatakan pada saat *Arab Spring* 2011, liputan Al Jazeera di Kairo, Tunis, dan Tripoli terlihat menunjukkan protes-protes masyarakat yang ingin menggulingkan pemimpinnya seperti Hosni Mubarak dari Mesir, Zine El Abidine Ben Ali dari Tunisia, dan Muammar Khadafi di Libya (Shane, 2013). Al Jazeera menyadari bahwa belum ada media yang berani membawa kekacauan sosial dan politik di Timur Tengah ke mata dunia. Terlebih sudut pandang yang ditawarkan Al Jazeera telah berani melawan sudut pandang pemerintah yang kesannya menganggap *Arab Spring* bukan sebagai pendewasaan politik

masyarakat, melainkan pembangkangan rakyat terhadap pemerintahnya. Sehingga dalam hal ini, Al Jazeera menjadi media kuat karena telah menjadi satu-satunya yang paling berani. Keinginan menjadikan Al Jazeera sebagai media yang kuat pada akhirnya bukan hanya keinginan Al Jazeera, melainkan juga keinginan pemerintah Qatar. Kekuatan Al Jazeera yang telah terkumpul dari 15 tahun sebelum *Arab Spring* menjadi modal bagi pemerintah Qatar dalam menegaskan posisinya dalam kawasan Timur Tengah. Keinginan pemerintah Qatar terhadap kuatnya Al Jazeera sebenarnya telah tergambar dari bagaimana pemerintah Qatar sejak awal berdirinya Al Jazeera tidak memberikan batasan bagi Al Jazeera untuk bergerak, yaitu dengan menghilangkan kewenangan pemerintah untuk melakukan sensor terhadap liputan-liputan Al Jazeera.

Hubungan antara Qatar dan Al Jazeera semakin menarik ketika Al Jazeera terlihat seperti menyelaraskan kebijakan luar negeri Qatar dalam konteks keberpihakannya di peristiwa *Arab Spring*. Ketika Qatar mengarahkan kebijakan luar negerinya selama *Arab Spring* untuk mendukung oposisi pemerintah salah satunya Ikhwanul Muslimin, Al Jazeera di segmen lainnya juga ikut berpihak kepada Ikhwanul Muslimin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya liputan Al Jazeera terkait Ikhwanul Muslimin selama *Arab Spring*. Terutama ketika Ikhwanul Muslimin mengandidatkan Mohammad Morsi sebagai Presiden Mesir. Bahkan ketika Mohammad Morsi telah terpilih sebagai presiden, Al Jazeera banyak membuat laporan berita yang seolah memuji Morsi (Qassemi, 2012). Pasca pelantikan Morsi sebagai presiden, Emir Qatar menjadi orang pertama yang memberikan selamat kepadanya. Hal-hal ini bisa diasumsikan ke dalam banyak hal. Bisa diasumsikan bahwa Qatar dan Ikhwanul Muslimin memiliki hubungan baik,

yang mana hal ini memenuhi strategi kebijakan luar negeri Qatar yaitu membuat jaringan dengan kelompok Islamis. Asumsi berikutnya ialah bahwa liputan Al Jazeera dalam peristiwa *Arab Spring* menyelaraskan kebijakan luar negeri Qatar dengan berpihak pada kelompok Islamis melalui liputannya. Pemerintah Qatar sendiri tidak berkomentar apa pun soal keberpihakan Al Jazeera kepada kelompok Islamis (karena memang itu yang diharapkan oleh pemerintah Qatar), sehingga secara tidak langsung pemerintah Qatar telah mendukung – bahkan bisa dibilang mendorong – liputan-liputan Al Jazeera dalam *Arab Spring*. Semenjak saat itu para analis melihat adanya perubahan besar dalam editorial Al Jazeera, yang mana ini dikatakan sebagai *turning point* Al Jazeera (Seib, 2017). Salem mengatakan bahwa Al Jazeera tidak lagi menjadi suara perlawanan Arab, malah menjadi bagian dari kelompok Islamis dan bagian dari kebijakan luar negeri Qatar. Bagaimanapun asumsi terkait hubungan Al Jazeera dan Qatar yang membawa mereka pada hubungan ‘budak dan majikan’, jelas dibantah oleh berbagai pihak. Baik dari Al Jazeera maupun dari pemerintah Qatar.

Meski pihak Qatar maupun Al Jazeera menafikan asumsi-asumsi tersebut, Arab Saudi (bersama dengan anggota GCC lainnya) tetap mencurigai Qatar yang menggunakan Al Jazeera sebagai alat propaganda. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan yang mendorong Arab Saudi dan anggota GCC lainnya mempertegas sikap mereka terhadap Qatar. Mereka, tentu saja dalam komando Arab Saudi, menilai bahwa Al Jazeera hanya menjadi platform untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Qatar, yang dalam pandangan mereka kebijakan luar negeri itu bertentangan dengan mereka (TheEconomist, 2017). Hingga puncaknya ialah mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2017.

2. Al Jazeera dalam Riyadh Agreement 2013/2014

Memilih jalur berbeda memang tidak mudah dan tanpa hambatan. Begitu pula Al Jazeera, yang bahkan sejak kelahirannya sudah mengidentifikasi dirinya sebagai media berita yang berbeda dari media-media arus utama di Timur Tengah kala itu. Menghancurkan batas-batas dalam jurnalisme, menghantarkan pada contoh jurnalisme profesional. Memberikan ruang pada isu-isu tabu untuk diangkat kepada publik yang butuh disadarkan dan dicerdaskan. Menjadi beda sendiri, yang paling berani dan paling mewakili. Hingga akhirnya Al Jazeera pun mau tidak mau harus berhadapan juga dengan pemerintah negara-negara Arab yang sangat menjaga kultur tradisionalisme konservatif serta kontra-revolusi salah satunya yaitu Arab Saudi.

Pada tahun 2017 Arab Saudi dan anggota GCC yang berada di pihaknya menindak tegas Qatar dengan memutuskan hubungan diplomatik masal dan menarik konsuler pada 5 Juni 2017, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab III. Melalui situs pers resmi Saudi Press Agency, pemerintah Arab Saudi menjelaskan alasannya ialah Qatar sudah melakukan pelanggaran berat selama beberapa tahun terakhir terhadap komitmennya, dengan tujuan untuk memecahkan stabilitas domestik dan melanggar kedaulatan Arab Saudi. Arab Saudi menilai Qatar telah membahayakan stabilitas di kawasan Teluk Arab dengan merangkul banyak teroris dan kelompok sektarian – seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaeda – kemudian mempromosikan kelompok tersebut melalui media, serta menggunakan media berita tersebut untuk menyulut hasutan-hasutan di internal yang membuat kekacauan di dalam negeri Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan nasionalnya dari bahaya terorisme dan ekstremisme yang

mana dilakukan oleh Qatar, sebagaimana yang sudah sering dituduhkan Arab Saudi kepada Qatar.

Berdasarkan pemaparan dari Arab Saudi di atas banyak alasan mengapa akhirnya Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik secara tegas dengan Qatar. Namun yang cukup menarik dari pemaparan alasan tersebut ialah singgungan Arab Saudi soal komitmen Qatar terhadap Riyadh Agreement – yang mana memiliki kisah sendiri dibalikinya – dan penggunaan media oleh Qatar yang membuat hasutan-hasutan pada internal Arab Saudi. Penulis menemukan bahwa Riyadh Agreement tersebut memiliki kaitannya dengan penyebab terjadinya krisis diplomatik Qatar tahun 2017, serta penolakan Arab Saudi terhadap media berita Al Jazeera (seperti yang telah disinggung pada sub bab “Arab Saudi: Pandangan terhadap Arab Spring dan Al Jazeera” sebelumnya). Sehingga dalam sub bab ini penulis akan membahas perihal Riyadh Agreement dan kaitannya dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar serta bagaimana posisi Al Jazeera di dalamnya.

Kala itu tahun 2017, sebulan setelah pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar, muncul sebuah berita dari CNN yang membocorkan dokumen rahasia yang disinyalir bahwa dokumen tersebut yang mampu menjelaskan krisis diplomatik 2017 yang dialami oleh Qatar. Karena dokumen ini tertanggal 2013 dan 2014, maka mau tidak mau kita harus bergerak mundur terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam tulisan yang dirilis oleh CNN di situs resminya pada tanggal 11 Juli 2017, mereka mengatakan bahwa dokumen tersebut merupakan sebuah perjanjian rahasia tentang kesepakatan

menjaga stabilitas sesama negara teluk yang dibuat antara negara-negara GCC – diprakarsai oleh Arab Saudi – dengan Qatar tahun 2013 dan 2014 (Sciutto & Herb, 2017). Nama kesepakatan tersebut ialah Riyadh Agreement 2013 dan Riyadh Agreement 2014. Dimulai pada November 2013, Arab Saudi dan Qatar, bersama Kuwait, membuat sebuah kesepakatan tertulis tentang beberapa hal. Perjanjian ini mulanya hanya ditulis dengan tangan yang kemudian langsung ditandatangani oleh ketiganya. Perjanjian ini juga tertulis dengan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh CNN dengan bahasa Inggris dan tertanggal 23 November 2013⁹. CNN telah menyertakan foto duplikat dokumen perjanjian tersebut di dalam tulisan berita yang berjudul “Exclusive: The Secret Documents that Help Explain the Qatar Crisis”. Isi dari perjanjian tersebut ialah:

- 1) Tidak ada gangguan dalam urusan internal pada negara-negara GCC, baik secara langsung maupun tidak langsung; Tidak memberikan suaka/perlindungan atau memberikan kewarganegaraan kepada warga negara GCC yang memiliki kegiatan yang menentang rezim negaranya, kecuali dengan persetujuan negaranya; Tidak ada dukungan untuk kelompok-kelompok menyimpang yang menentang negara mereka; tidak ada dukungan kepada media yang antagonis.
- 2) Tidak ada dukungan kepada Ikhwanul Muslimin atau organisasi, kelompok, atau individu mana pun yang mengancam keamanan dan

⁹ Diunduh melalui <https://i2.cdn.turner.com/cnn/2017/images/07/10/translation.of.agreementsupdated.pdf>, akses pada tanggal 4 Oktober 2019

stabilitas negara-negara GCC melalui kerja keamanan langsung (militer) ataupun pengaruh politik.

- 3) Tidak memberikan dukungan kepada faksi mana pun di Yaman yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga Yaman.

Kemudian satu tahun setelah perjanjian tersebut dibentuk dan ditandatangani, tahun 2014 Arab Saudi menanggukkan hubungan diplomatik dengan Qatar yang ditandai dengan pemanggilan duta besar Arab Saudi dari Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik ini dikarenakan Qatar tidak mampu berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani (Yehoshua, Admon, & Hoffman, 2014). Berbeda dengan ketegangan hubungan di tahun 2002, kali ini ketegangan juga terjadi antara Qatar dan beberapa negara GCC lainnya yaitu Bahrain dan Uni Emirat Arab secara bersamaan. Kemudian delapan bulan setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2014 terjadi, Arab Saudi kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Qatar pada November 2014. Dalam dokumen rahasia yang tercatat tanggal 16 November 2014, Arab Saudi dan Qatar kembali membuat kesepakatan, lebih tepatnya, memperbaharui kesepakatan. Bisa dipastikan kembalinya hubungan Arab Saudi dan Qatar ialah setelah penandatanganan Riyadh Agreement yang telah diperbaharui. Kali ini ditandatangani oleh Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Dalam perjanjian ini tertulis bahwa Arab Saudi mengundang negara-negara tersebut untuk menandatangani Riyadh Agreement 2014 (Sciutto & Herb, 2017). Isi dari perjanjian tersebut hanya menegaskan apa yang telah disebutkan dalam Riyadh Agreement 2013, namun dengan beberapa tambahan. Isi dari perjanjian tersebut ialah:

- 1) Menekankan bahwa jika tidak berkomitmen terhadap pasal-pasal pada Riyadh Agreement merupakan pelanggaran terhadap keseluruhan perjanjian.
- 2) Apa yang telah dicapai oleh para kepala intelijen dalam sebuah laporan dianggap sebagai langkah maju untuk diterapkan Riyadh Agreement dan langkah-langkah eksekutifnya, dengan perlunya komitmen penuh untuk menerpakan semua yang tertulis di dalamnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal perjanjian.
- 3) Tidak memberikan perlindungan, mempekerjakan, atau mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri atau di luar negeri, kepada orang atau staf media yang berpotensi membahayakan bagi negara-negara anggota GCC. Setiap negara berkomitmen untuk mengambil langkah peraturan, hukum, dan yudisial terhadap siapa pun yang melakukan perbuatan melanggar batas atau gangguan terhadap urusan dalam negeri terhadap negara-negara GCC, termasuk mengadilinya dan mengumungkannya di media.
- 4) Semua negara berkomitmen pada wacana bersama GCC untuk mendukung Republik Arab Mesir dan berkontribusi terhadap keamanan, stabilitas, dan dukungan keuangan kepadanya. Menghentikan semua aktivitas media yang diarahkan terhadap Republik Arab Mesir di semua platform media, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pelanggaran yang disiarkan di Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher Misr, dan bekerja untuk menghentikan semua pelanggaran di media Mesir.

Setelah itu, karena lagi-lagi Qatar gagal memenuhi komitmen yang sudah dibuat, terjadilah pemutusan hubungan diplomatik besar-besaran tahun 2017. Ketika terjadi keregangan hubungan yang terakhir, Qatar dinilai memosisikan dirinya sebagai korban karena tetangga-tetangganya seolah mengasingkannya. Bahkan Qatar menafikan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu Arab Saudi merasa penting menyadarkan Qatar atas apa kesalahannya dengan membocorkan dokumen rahasia perjanjian antara Arab Saudi dan Qatar (Alkhereiji, 2017).

Isi dari kedua perjanjian ini sebenarnya mirip dengan alasan-alasan Arab Saudi mengapa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2017. Terutama terkait media berita, dalam hal ini Al Jazeera, yang pada tahun 2017 Arab Saudi menuntut Qatar untuk menutupnya. Perjanjian ini kemudian memperlihatkan bahwa Al Jazeera berada di tengah-tengah krisis hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar. Dalam Riyadh Agreement 2013 Arab Saudi dan pendukungnya menyinggung media berita Qatar yang disebut dengan “antagonistic media”. Dari berbagai pendapat analis, maksud dari “antagonistic media” tersebut merujuk pada Al Jazeera. Sementara di Riyadh Agreement 2014 nama Al Jazeera disebut secara terang-terangan sebagai media yang telah melakukan pelanggaran. Bahkan secara spesifik dalam Riyadh Agreement 2014 disebutkan bahwa Al Jazeera diminta untuk menghentikan segala aktivitasnya di negara lain – khususnya Mesir – karena dinilai telah menyerang negara tersebut. Aktivitas Al Jazeera yang dinilai sebagai bentuk serangan ialah liputannya terhadap gejolak politik Mesir dari tahun 2011 hingga tahun 2013 (saat kudeta terhadap Presiden Mohammad Morsi), baik liputan dalam bentuk siaran televisi maupun berita di situs resminya. Termasuk aktivitas saluran

khusus Al Jazeera untuk Mesir yaitu Al Jazeera Mubasher Misr (AJMM). Dalam Riyadh Agreement 2014, secara khusus disebutkan bahwa Arab Saudi dan pendukungnya meminta saluran AJMM (saluran khusus Al Jazeera untuk menyiarkan apa yang terjadi di Mesir secara langsung) untuk dihentikan. Selang satu bulan setelah penandatanganan Riyadh Agreement 2014 pada November 2014, melalui situs pr.aljazeera.com, Al Jazeera Media Network pun membekukan izin siaran AJMM pada tanggal 22 Desember 2014 (Al-Jazeera, 2014) (BBC, 2014). Kemudian, setelah memutuskan vakumnya Al Jazeera Mubasher Misr, Al Jazeera kemudian membuat format baru dari Al Jazeera Mubasher yaitu Al Jazeera Mubasher Al-‘Amma yang peliputannya lebih umum.

Keberadaan Al Jazeera di tengah krisis diplomatik Qatar seperti disebutkan di atas, merupakan konsekuensi dari dua hal yang saling berkaitan, yang pertama ialah perannya sebagai *agenda-setting agent*, kedua ialah dukungan Qatar terhadap aktivitas Al Jazeera, keduanya terkhusus dalam konteks kejadian selama *Arab Spring*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab “Al Jazeera dan Agenda-Setting soal Isu Revolusi Arab 2011” di bab IV, Al Jazeera memberikan ruang luas terhadap isu revolusi Arab 2011 atau *Arab Spring* untuk menjadi perhatian publik, baik melalui siaran berita dan program debat di televisi, maupun situs berita *online* Al Jazeera. Arab Saudi – sebagai negara yang kontra-revolusi – memandang aktivitas Al Jazeera tersebut sebagai ancaman bagi negaranya. Liputan Al Jazeera terkait dengan *Arab Spring* bisa berdampak pada gejolak sosial di dalam negara Arab Saudi, sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bab “Arab Saudi: Pandangan terhadap Arab Spring dan Al Jazeera” di bab IV. Ketakutan juga dirasakan Arab Saudi terkait posisinya sebagai kekuatan regional di Timur Tengah

akan terancam dengan hadirnya kekuatan pengaruh baru seperti Al Jazeera. Dalam hal ini ialah kekuatan yang dimiliki oleh Al Jazeera dalam memengaruhi opini publik Timur Tengah, yang mana harusnya berada pada kendali Arab Saudi dan rezim-rezim pemerintahan negara Timur Tengah pendukung Arab Saudi.

Aktivitas tersebut semakin membuat rumit hubungan Arab Saudi dan Qatar karena isu *Arab Spring* yang diangkat oleh Al Jazeera berkaitan hubungannya dengan kebijakan luar negeri Qatar. Di sini kemudian masuk poin kedua yaitu dukungan Qatar terhadap aktivitas Al Jazeera. Arab Saudi – yang merupakan negara dengan dominasinya di regional Timur Tengah – curiga terhadap Qatar bahwa dia menggunakan Al Jazeera hanya untuk kepentingan Qatar, hal tersebut cukup mengancam posisi Arab Saudi di Timur Tengah. Karena rasa terancam tersebut, Arab Saudi meminta Qatar untuk membuat kesepakatan yang disebut di atas sebagai Riyadh Agreement. Alasan Arab Saudi dalam hal ini tidak terlepas dari bagaimana hubungan yang terjalin antara Qatar dan Al Jazeera. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara Qatar dan Al Jazeera sangat dalam. Pemerintah Qatar bertanggungjawab dibalik pendirian Al Jazeera pada tahun 1996, termasuk dalam pendanaan untuk aktivitas operasionalnya. Namun, hubungan dekat Qatar dan Al Jazeera nyatanya tidak mampu menjadi modal bagi Arab Saudi untuk membendung aktivitas Al Jazeera yang dinilai berbahaya bagi Arab Saudi. Kegagalan Qatar, atau bisa dikatakan keengganan, untuk menjaga komitmen terhadap Riyadh Agreement ialah bukti bahwa Qatar masih berupaya untuk menjaga independensinya dalam membuat kebijakan. Independensi Qatar dalam kebijakannya, terutama kebijakan luar negeri, sudah jelas menyiratkan bahwa Qatar hendak lepas dari pengaruh Arab Saudi terhadap keputusan yang diambilnya.

Termasuk keputusannya membuat media berita dengan arah gerak yang independen tanpa kontrol pemerintah negara, sebagaimana kebanyakan media di Timur Tengah, yang salah satunya dikontrol oleh Arab Saudi. Selama *Arab Spring* perbedaan kebijakan luar negeri Qatar dengan Arab Saudi terlihat. Qatar mendukung gerakan revolusioner di negara terdampak *Arab Spring*, sedang Arab Saudi mendukung rezim pemerintahan negara terkait. Al Jazeera yang merupakan media berita – didirikan dan didanai Qatar – dengan slogan “Voice of Voiceless” dan berpihak pada publik, sudut pandang yang digunakan pada liputan mereka dalam *Arab Spring* ialah para demonstran, kelompok oposisi, bahkan kelompok Islamis, yang mana mereka ialah suara yang belum pernah diperjuangkan media-media berita tradisional. Sehingga dalam hal ini, ada keselarasan antara Qatar dan Al Jazeera. Tidak seperti negara-negara Timur Tengah lain yang akan membungkam media dengan model seperti Al Jazeera, Qatar malah membiarkannya dan masih membela kala Al Jazeera dituduhkan bermacam-macam hal. Dari sini, perlakuan Saudi terhadap Qatar (sejak Riyadh Agreement 2013 hingga Krisis Diplomatik 2017) menjadi beralasan, dan Al Jazeera berada di tengah-tengahnya.